



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2024



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 14 Oktober 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan III tahun 2024.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
8. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 105,76. Selama Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 9 indikator kinerja, dimana 16 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester

2 atau tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 9 indikator kinerja:

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 96,83;
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 100;
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
4. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
6. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 70 dan capaian sebesar 80;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 80 dan capaian 87,67;
8. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
9. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 94% dan capaian sebesar 128,89%.

Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 70,06% atau sebesar Rp **26.806.009.890,-** (*Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **38.259.850.000,-** (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Maksud dan Tujuan	10
C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10
D. Data Umum Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024	16
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024	18
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
E. Pengukuran Capaian Kinerja	22
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024 23	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024	23
2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan	23
B. Analisis Pencapaian Kinerja	26
1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	26
2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	37
3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	51
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	70
5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	74
C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Dengan Satker UPT Sejenis / Setara	64

D. Efisiensi.....	67
E. Realisasi Anggaran.....	80
BAB IV.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran dan Rekomendasi.....	84

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan <i>Speedboat</i> siap operasi	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja	15
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	20
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024	24
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024.....	26
Tabel 6. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	26
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024	27
Tabel 8. Capaian IKU 2.....	29
Tabel 9. Perhitungan Capaian IKU 2	30
Tabel 10. Capaian IKU 3.....	33
Tabel 11. Perhitungan capaian IKU 3.....	33
Tabel 12. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	35
Tabel 13. Capaian IK 4	36
Tabel 14. Tahapan pemeriksaan IKU 7.....	38
Tabel 15. Capaian IKU 7.....	38
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 17. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan III.....	41
Tabel 18. Rekap Pengawasan Pencemaran.....	42
Tabel 19. Rekap Pengawasan PRL.....	44
Tabel 20. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi.....	46
Tabel 21. Rekap Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan	48
Tabel 22. Rekap Pengawasan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	50
Tabel 23. Pemeriksaan IKU 8	51
Tabel 24. Capaian IKU 8.....	52
Tabel 25. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024	54
Tabel 26. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan Triwulan III	54
Tabel 27. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW III Tahun 2024	55
Tabel 28. Rekap Pengawasan Unit Pengolahan Ikan.....	62
Tabel 29. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran	64
Tabel 30. Rekap pengawasan budidaya.....	65
Tabel 31. Capaian IKU 9.....	71
Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024	71
Tabel 33. Rekap penganan sanksi administratif	72
Tabel 34. Capaian IK 12	76
Tabel 35. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024	77
Tabel 36. Capaian IK 15	78
Tabel 37. Capaian IK 21	79
Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara.....	81

Tabel 39. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan
Periode Tahun 2024..... 84

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	13
Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.....	14
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan LKJ Stasiun PSDKP Belawan	15
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.

- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

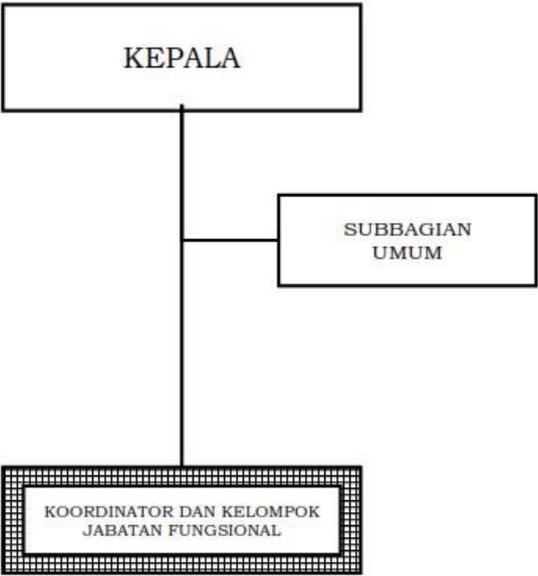
Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

d. Satuan Pengawasan SDKP:

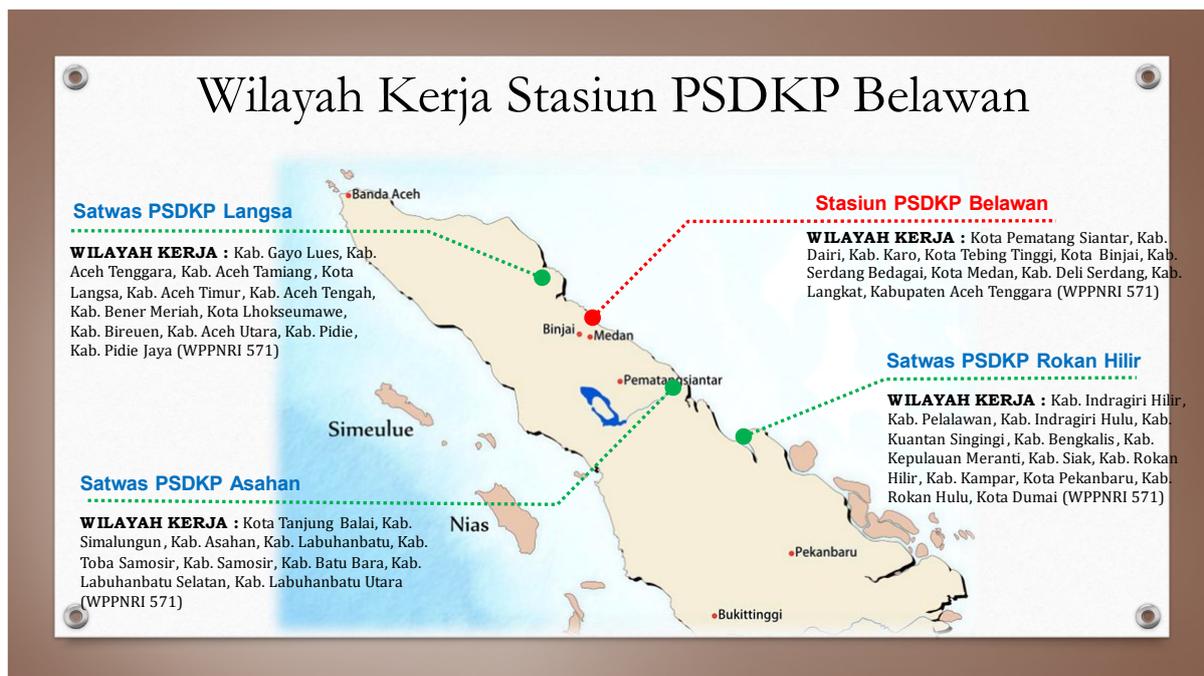
Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas dan *speedboat* pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 151 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 86 orang, 5 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 51 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah (Orang)
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	27	4	13	44
2	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	3	1	1	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Idi	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Lhokseumawe	1	1	-	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Biureun	1	-	-	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Sigli*	-	-	-	-
3	Satwas Pengawasan SDKP Asahan	5	3	4	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Batubara*	-	-	1	1
4	Satuan Pengawasan Rokan Hilir	3	-	2	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Panipahan	-	-	1	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Dumai	1	-	1	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Kep. Meranti	2	-	-	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Indragiri Hilir	2	-	-	2
5	KP. Hiu 01	11	-	1	12
5	KP. Hiu 08	11	-	1	12
7	KP. Hiu 16	10	-	2	12
	Total	80	9	29	117

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKJ Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2024; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 - 2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6		9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82		

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 105,76% untuk Triwulan III, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan
Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 25 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2024	September	September	
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						0	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0	0	0
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,66	
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	96,83	106,41
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						0	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100	
7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100	
8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						114,29	
9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	70	80	114,29
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						0	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	0		0
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						109,59	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	87,67	109,59
13	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0		0

14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		0
15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0	0	0
17	Penilaian Mandiri SAKIP SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0		0
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0	0
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21	0		0
20	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	128,89	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0	0	0
25	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		0

Pada Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 25 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 9 IK dilaksanakan dengan kriteria 7 IK dengan predikat baik, 2 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan III tahun 2024. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 70,06% atau sebesar Rp 26.806.009.890,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari alokasi anggaran Rp 38.259.850.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	19.684.016.000	12,129,201,329	61,62%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000	361,017,270	42,52%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512.707.000	447,509,013	87,28%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.072.000.000	736,216,625	68,68%
5	Dukungan Manajemen	16.142.127.000	13,132,065,653	81,35%
Total		38.259.850.000	26,806,009,890	70,06%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 9 indikator kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran Kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Perbandingan capaian IKU pada SK 2 ini pada TW III Tahun 2024 di bandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

No	Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023	Target TW III Tahun 2024	Capaian TW III Tahun 2024
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87.6	99,77	91	96,83
2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	87.6	78,66	91	100
3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup	-	-	100	100

No	Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023	Target TW III Tahun 2024	Capaian TW III Tahun 2024
	UPT Stasiun PSDKP Belawan				

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2021 : Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	-	-	0,78	1,8	-	-	-
2021 : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	0,028	0,11	-	-	-
2022 - 2024 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	91	-	-	-	87,5	87,6	91
2022 - 2024 : Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	91	-	-	-	87,5	87,6	91
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	-	-	-	-	-	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.570.846.000 dan sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 9.292.024.776 atau sebesar 80,31%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar 80,31%.

Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu 01, Kapal Pengawas Hiu 08 dan Kapal Pengawas Hiu 16, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 571.

a. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Stasiun PSDKP Belawan mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terutama di WPP NRI 571. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp	= Indeks kinerja Kapal Pengawas
Bobot (%)	= Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	= Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target	= Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. **Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%, Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 unit kapal ikan per hari dan 1 objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Selama Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian **96,83** dengan persentasi **106,41%** sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2024 dari target Triwulan III sebesar **91**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 8. Capaian IKU 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III 2023	TW III 2023
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	91	91	96,83	96,83	99,77

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan sudah mencapai target. Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 ini juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023. **Analisa penyebab** tercapainya target TW III pada IKU 2 ini karena :

1. Perencanaan hari operasi kapal pengawas yang baik.
2. Terlaksananya perawatan kapal pengawas dengan baik sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
3. Monitoring terhadap kegiatan dan penyelesaian laporan kegiatan dilaksanakan dengan baik.

Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Perhitungan Capaian IKU 2

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker	
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II				
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi			Nilai
1	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	99	100	70,00	4	1	7,50	31,00	0,10	0,11	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	0	0	40	5	91,00	96,83
		KP. HIU 08	81	82	70,00	3	4	30,00	40,00	0,10	0,11	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	0	0	40	5	100,00	
		KP. HIU 16	108	106	68,70	5	12	30,00	39,48	0,40	0,45	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	0	0	40	5	99,48	

Selama Triwulan III, KP Hiu 01 telah melaksanakan 13 hari operasi, KP Hiu 08 telah melaksanakan 7 hari operasi dan KP Hiu 16 telah melaksanakan 11 hari operasi. Realisasi anggaran untuk operasional kapal pengawas sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.116.783.776 atau sekitar 81,52% dari total pagu sebesar Rp.11.182.856.000.

b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Dalam kurun waktu sampai akhir Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian yang diperoleh sebesar **100** dengan persentase sebesar **109,89%** dari **target sebesar 91 pada Triwulan III 2024**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 10. Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III	2024	TW III	s/d	TW III
			2024	TW III	2023
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	91	91	100	100	78,66

Selama Triwulan III tahun 2024 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 91, bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 capaian pada Triwulan III Tahun 2024 mengalami peningkatan. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 11. Perhitungan capaian IKU 3

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Pompon Illegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II	TW II			TW II			TW II										
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai						
Stasiun PSDKP Belawan	Dolphin 14	21	34	50,0	2	2	50,0	40,00	0,00015	0,0001	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100,00	100	
	Napoleon 28	17	43	50,0	0	0	50,0	40,00	0,00021	0,0002	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100,00		

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patroil lebih optimal;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang serta peralatan keselamatan, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Mengidentifikasi armada yang sudah tidak dapat beroperasi, armada yang sudah tidak layak guna segera dilaksanakan pelaporan sehingga tidak lagi memperoleh anggaran operasi yang nantinya bisa menghambat pencapaian kinerja;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp. 175.241.000,- atau sebesar 45,17% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 387.990.000. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Stasiun PSDKP Belawan selama Triwulan III telah melaksanakan 19 hari operasi dari total keseluruhan 2 armada speedboat pengawasan. 1 Armada Stasiun PSDKP Belawan (Napoleon 028) berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 1 Armada berada dalam kondisi siap terbatas yaitu Doplhin 014 yang berada di satwas Asahan. Realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	TMT Operasi	Realisasi Hari Operasi	Lokasi Operasi (WPP)	Keterangan
1	Napoleon 028	30	12	571	Siap Operasi
2	Dolphin 014	30	7	571	Siap Terbatas

c. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang aspek pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas meliputi logistik kapal dan logistik personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personal meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas atau berita acara sisa pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan atk dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2024. Capaian ini diperoleh dengan ketentuan bahwa Stasiun PSDKP Belawan telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personal.

Berdasarkan manual indikator kinerja maka indeks kinerja ini dianggap terpenuhi dengan berita acara tersebut. Untuk komponen logistik lainnya seperti pemenuhan natura, atk/cs, air bersih maka Stasiun PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun SPJ pembelian, dan untuk ketersediaan senjata dan amunisi didasarkan pada laporan ketersediaan senpi maupun amunisi oleh kapal pengawas. Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan. Berikut tabel capaian indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.

Tabel 13. Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III 2023	TW III 2023
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	-

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistic personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Stasiun PSDKP Belawan melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistic atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggungjawaban;
- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Stasiun PSDKP Belawan melalui tim kerja Prasarana dan sarana operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;
- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama Triwulan III tahun anggaran 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp. 7.615.856.056,- atau 80,39% dari total anggaran operasional sebesar Rp. 9.473.515.000,-.

3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah pernah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan sebelumnya.

a. IKU 7: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Tahapan pemeriksaan IKU 7

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

TW III Tahun 2024 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III 2023	TW III 2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan

batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga

distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;

2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	16 pelaku usaha.	95	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	-	-	-	100	-
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-	-	-	-	100

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 17. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan III

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2023
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	6
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	7	0
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	13	4
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	1	0
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		24	11

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif. Realisasi anggaran selama Triwulan III tahun 2024 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 447.509.013,- atau 87,28% dari pagu sebesar Rp. 512.707.000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 13 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan

limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pada tahun 2024 target pencemaran yang harus dicapai sebanyak 30 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Perlu untuk diketahui bahwa pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan belum banyak terdapat pabrik atau industri skala besar yang berpotensi melakukan pencemaran.

Tabel 18. Rekap Pengawasan Pencemaran

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Suri Tani Pemuka	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
UD Pangkai Na	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di UD Pangkai Na sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
PT. Bumi Menara Internusa	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT. Red Ribbon Indonesia	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT Ayu Bumi Sejati	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
PT. Sumber Utama Nusantara	- Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. SUN sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.
PT. Anugerah Alam Industri	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT. Bahari Makmur Sejati	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT. Sorby Internasional Medan	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Sorby Internasional Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi adanya pelanggaran.

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Toba Surimi Industries	- Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. Toba Surimi Industries sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.
PT. Seafood Samudera Pasific	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. SSP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran
PT. Marine Maju Perkasa	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT. Aneka Sari Utama	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap 7pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 19. Rekap Pengawasan PRL

No	UPT/Satwas	No SPT	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
										Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	B.1917/PSDKPSta.2/KP.440/VII/2024	Sirman Rajagukguk, Sri Kartaharja, Sila Sazali, Achmad Muttaqin	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	-	Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang	Terminal Khusus (TERSUS).	Kawasan Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.	NIB 8120109982359, Izin Lingkungan,		^	Terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang berupa eksisting 2 dermaga dan trestle dengan luas 1.585 m2 atau 0,158 ha tanpa PKKPR. Kegiatan pemanfaatan ini melanggar ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 101 Ayat (3) PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penaatan Ruang.
2	Stasiun PSDKP Belawan	B.1917/PSDKPSta.2/KP.440/VII/2024	Sirman Rajagukguk, Sri Kartaharja, Sila Sazali, Achmad Muttaqin	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	Setyo Budi Utomo	PT. National Sago Prima (NSP)	Terminal Khusus (TERSUS).	Dusun I, Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau.	Izin usaha industri, Izin Lingkungan, Izin Pembangunan, Izin Operasi Tersus		^	Terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di di PT. NSP berupa 2 Dermaga dengan luas 1.026 m2 atau 0,102 ha tanpa PKKPR, melanggar ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 101 Ayat (3) PP 21 Tahun 2021 tentang PenyelenggaraanPenaatan Ruang.
3	Stasiun PSDKP Belawan	B.1946/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Muhamad Syamsu Rokhman, Muhammad Iqbal, Muhadi, Irfan Dani Syahputra	30 Juli 2024	Ir. Suratno	PT. Energi Unggul Persada	Terminal Khusus (TERSUS).	Kota Dumai Provinsi Riau	NIB 8120103921509, Izin Pembangunan Terminal Khusus, Izin Operasional Terminal Khusus		^	Pelaku usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut belum memiliki perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena belum melakukan mitigasi lingkungan serta kegiatan tersebut tidak terdata oleh KKP. Sehingga diduga melanggar dua ketentuan,yaitu; Pasal 18 angka 13 Jo Pasal 18 angka 12, UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk pelanggaran tidak memiliki dokumen KKPRL.
4	Stasiun PSDKP Belawan	B.1946/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Muhamad Syamsu Rokhman, Muhammad Iqbal, Muhadi, Irfan Dani Syahputra	30 Juli 2024	Paulus Lidi	PT IVO MAS TUNGGAL	Terminal Khusus (TERSUS).	Kota Dumai Provinsi Riau	NIB 8120214051791, (SKKLH)		^	Pelaku usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut belum memiliki perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena belum melakukan mitigasi lingkungan serta kegiatan tersebut tidak terdata oleh KKP. Sehingga diduga melanggar dua ketentuan, yaitu; Pasal 18 angka 13 Jo Pasal 18 angka 12, UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk pelanggaran tidak memiliki dokumen KKPRL.
5	Stasiun PSDKP Belawan	B.1946/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Hendri Hamzah, Muhammad Fahrul Riza, Abdullah Ali Hakim Nasution	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	Release Ryantoro	PT. PELINDO I SEI PAKNING	Terminal Khusus (TERSUS).	Sei Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 8120109982359		^	Polsus PWP3K dan tim akan melakukan tindakan lebih lanjut dan akan Melakukan koordinasi ke PT. Pelindo Regional I Cabang Pekan Baru untuk memastikan kepemilikan dan pengelolaan Dermaga di Pelindo Sei Pakning.
6	Stasiun PSDKP Belawan	B.1946/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Hendri Hamzah, Muhammad Fahrul Riza, Abdullah Ali Hakim Nasution	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	Didit Purwahanoko	PT. MESKOM AGRISARIMAS	Perusahaan sawit dan olahannya	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 81200029952726,		^	Polsus PWP3K dan tim menyampaikan segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di luar garis Pantai terluar wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021
7	Stasiun PSDKP Belawan	B.1946/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Hendri Hamzah, Muhammad Fahrul Riza, Abdullah Ali Hakim Nasution	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	Efendi	CV. Bestari Jaya	Perusahaan Logistik	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 9120009722259, Izin lingkungan		^	Polsus PWP3K dan tim menyampaikan segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di luar garis Pantai terluar wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap 1 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES sehingga capaian kinerja pengawasan ikan yang dilindungi sampai dengan TW III tahun 2024 telah tercapai 4 pengawasan pelaku usaha. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Stasiun PSDKP Belawan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan Stasiun PSDKP Belawan terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 20. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

No	UPT/Satwas	No SPT	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
										Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	B.1993/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Dia Murthala, Muhammad Hamdani, Bobby Novriza Nasution dan Muhammad Fahrul Riza	16 Agustus 2024	Muhammad Risky	-	jenis ikan yang dilindungi	Dusun Tgk. Muda Leube Gp. Paya Bieng Kec. Jangka Kabupaten Bireun Prov. Aceh	NIB (1239000210498), SIPJI Dalam Negeri (161/1/KKP/2021), SAJI DN (00846/SAJI/DN/BPSPL .1/IV/2024) dan KBLI 46216.1 Perdagangan Besar Hasil Perikanan	^		Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Muhammad Risky disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan

Pada TW III Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan kepada 2 pelaku usaha. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 1 target pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan.

Tabel 21. Rekap Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan

No	UPT/Satwas	No SPT	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ya	Tidak	Rekomendasi
1	Stasiun PSDKP Belawan	B.1628/PSDKPSta.2/KP.440/VII/2024	Muhammad Hamdani, Muhammad Fahrul Riza, Afriani, SM Khalidi	10 Juli 2024	Mansur	-	Wisata Pantai	Desa Matang Rayeuk , Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur,	NIB 0606240063037, SPPL, Izin Lingkungan	^		Pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya
2	Stasiun PSDKP Belawan	B.2107/PSDKPSta.2/KP.440/VIII/2024	Irmansyah Putra, Hartoto, dan Benardo	29 Agustus 2024	Muhammad Khairullah Ikhsan	-	Pengelolaan Objek Wisata	Wisata Alam Datuk, Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara	NIB 9120109852211, Izin Lingkungan,	^		Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya.

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak merupakan kegiatan yang baru ada pada RKAKL tahun 2024 di Stasiun PSDKP Belawan. Pada TW III tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak kepada 1 pelaku usaha. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 15 target pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan Destructive Fishing meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 22. Rekap Pengawasan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

No	UPT/Satwas	No SPT	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
										Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	B.1603/PSDKPSta.2 /KP.440/VII/2024	Hartoto, Denggan Muhammad Ilmi, Hendri Hamzah, Sila Sazali, Susanto Manggapo, Oktafiandi Fajrin, Indra Dwi Cahyo, Yul Harisman	1 s.d 6 Juli 2024	Karya Efendi	Karya Efendi	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau	-	^	Hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit perahu motor milik Karya Efendi yang memiliki alat tangkap sondong dan perangkat setrum yang merupakan alat tangkap yang dilarang dan berbahaya. Nelayan an. Karya Efendi beserta alat tangkap yang dilarang dibawa ke kantor UPT PSDKP Wilayah I DKP Provinsi Riau di Tembilahan untuk dimintai keterangan dan diberikan surat peringatan agar yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak serta mengajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan destructive fishing.	

4. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 8: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 23. Pemeriksaan IKU 8

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 8.

Tabel 24. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III 2023	TW III 2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;

3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak *stakeholder* yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 25 berikut :

Tabel 25. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	-	-	-	-	100	100

Sepanjang Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 88 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 68,68% atau sebesar Rp. 736.216.625,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.072.000.000,-. Berikut kami sajikan tabel rekapitulasi total pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel 26. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan Triwulan III

NO	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	Total
1	51	25	7	5	88
	51	25	7	5	88

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pada TW III Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan Pengawasan terhadap 52 pelaku usaha kapal perikanan dan Stasiun PSDKP Belawan juga telah melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Capaian pada TW III tahun 2024 ini lebih besar bila di bandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dengan capaian 7 pelaku usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2024 sebagaimana Tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW III Tahun 2024

Nama	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PO TJAI	202309-2914-1702-7014-027	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 31 Desember 2023 Kapal Bintang Surya telah memperpanjang izin sampai dengan 31 Des 2024 dengan Kode Proyek 2023'12-'1916-250G7872-97 4
RAHWANI	202308-2514-5556-3743-993	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 31 Desember 2023 Kapal Sumber Sempurna telah memperpanjang izin berlaku sampai dengan 31 Des 2024
SONTEL SUKARDI	202301-3116-3028-4264-579	OSS	Kode proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 25 Februari 2024, kapal Haiteri telah memperpanjang izin usaha yang berlaku sampai 32 Desember 2024 dengan kode proyek 202401-2615-3214-8576-731
HUGO SIGIARTO ASALLI	202309-2511-5332-4738-258	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 31 Desember 2023 Kapal Sinar Nelayan telah memperpanjang iln sampaidengan 31Des2024 dengan Kode Proyek 202312-21'1W53G3652-511
MITRA MAJU LESTARI	202309-0413-3855-3756-868	OSS	sudah sesuai

LADY FRISTANTI	202208-2214-1755-1973-159	OSS	penilaian kepatuhan teknis dalam BAP tidak dicantumkan pada point II.13, sehingga tidak lengkap BAPnya
CALVIN CHANG	202310-1109-4827-1945-375	OSS	sudah sesuai
HOTMAN	202303-0311-4617-4518-654	OSS	sudah sesuai
TONGDY HAIDIR	202302-0318-5036-4476-225	OSS	Dokumen perizinan lengkap, kapal sudah tidak ada dikarenakan sudah dimakan usia (tidak laik operasi) dan bagian kapal yang masih laik sudah dipergunakan untuk bagian kapal lainnya. Direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan kode proyek karena kapal sudah tidak ada.
TIONG KIAN	202301-3016-4946-2403-063	OSS	Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan
YOHAN	202201-1113-4952-3647-507	OSS	Nilai kepatuhan teknis pada kode proyek yang diperiksa sebesar 75% (baik sekali). Nilai yang kurang terdapat pada bagian kesesuaian struktur organisasi dan SDM dan bagian proses. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum memenuhi ketentuan sertifikasi Nakhoda, Perwira Mesin dan Anak Buah Kapal yang dipersyaratkan serta belum memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas kapal.
TAN IE ING	202302-0910-5749-7206-160	OSS	Nilai kepatuhan teknis pelaku usaha baik sekali
YUNAN ALIAS TOBENG	202310-2715-2040-7262-386	OSS	Yunan aliasn Tobeng telah melengkapi dokumen perizinan berusaha Nilai kepatuhan teknis sebesar 80.7%
KELVIN	202310-0614-0517-4718-656	OSS	BAP dan form penilaian teknis tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diverifikasi

WENDY	202402-2009-3823-7742-321	OSS	Dalam analisa hasil pengawasan harusnya dimasukkan temuan bahwa kapal ini adalah kapal migrasi yang wajib memiliki VMS dan dihibmabau memasang VMS walaupun masih ada relaksasi dan perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
WENDY	202402-2014-1046-0532-740	OSS	Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
TONDI MARYONO	202302-0407-0246-2686-644	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis, Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
ALEX NARSISCO	202403-2814-3650-3331-308	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis, Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
HENDRI	202308-1915-0603-1352-514	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis
HENDRI	202308-1916-2328-5932-875	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis
TONDI HARYONO	202302-0319-3525-0905-221	OSS	walaupun kapal tidak beroperasi, seharusnya tetap diberikan catatan analisa hasil pengawasan
TONDI HARYONO	202302-0319-2848-7311-130	OSS	Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
WENDY	202402-2009-3441-5702-083	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis, Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa

WENDY	202402-2014-0820-6104-708	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis, Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
ALEX NARSISCO	202402-1614-2802-3588-358	OSS	BAP dan form penilaian teknis tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diverifikasi
ALEX NARSISCO	202402-0614-1742-5932-421	OSS	BAP dan form penilaian teknis tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diverifikasi
IRWAN	202308-2809-4215-9885-940	OSS	Penilaian teknis dalam BAP kosong, harusnya cantumkan hasil penilaian teknis dari form penilaian kepatuhan teknis, Dalam analisa hasil pengawasan harusnya perbaikan untuk melengkapi CPIB dimasukkan dalam kolom analisa
ANJLI SYAHPUTRA	202311-2919-2507-2978-189	OSS	penilaian sebesar 63,5% artinya ada yang tidak terpenuhi, jelaskan dalam analisa apa saja yg tidak terpenuhi
MAHMUDIN	202405--1711-3104-4243-170	OSS	sudah sesuai
ABDUL MANAN	202405-3010-3539-3134-492	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha sebesar 70 %(Baik) BBM sulit dan membeli harus ada agen yang menaikan harga. Daerah Penangkapan semakin Jauh, Hasil Tangkapan dalam kondisi kurang maksimal.
SYAFRUDDIN	202308-1015-5857-9863-165	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Sebesar 63,5 % BBM sulit didapat Harga Ikan Murah
AZHARI	202401-0916-2521-0674-216	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha sebesar 63,5
HELLEN DEA REGITA	202307-1811-0839-5263-518	OSS	-Nilai Kepatuhan teknis Pelaku usaha 85%(Baik Sekali)

SYAHRUL HUSAINI	202312-2910-4440-1933-797	OSS	Syahrul Husaini telah melengkapi perizinan berusaha penangkapan ikan, pada kode proyek ini kapal terdaftar yaitu KM. New Century GT.51 dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, kapal beroperasi di WPP NRI 571 dan ZEEI WPP NRI 571, KM. New Century GT 51 melaporkan kedatangan, membayarkan kewajiban PNBPN serta melaporkan keberangkatan dan melaksanakan kewajiban selama periode penangkapan.
SYAHRUL HUSAINI	202312-2911-5151-9267-313	OSS	Syahrul Husaini telah memiliki perizinan berusaha penangkapan ikan, pada kode proyek ini kapal terdaftar yaitu KM. Luxury Baru GT 30 dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, kapal beroperasi di WPP NRI 571 dan ZEEI WPP NRI 571, KM. Luxury Baru GT.30 melaporkan kedatangan, membayarkan kewajiban PNBPN serta melaporkan keberangkatan dan melaksanakan kewajiban selama periode penangkapan
MAHMUDIN	202402-2811-5252-1106-551	OSS	Mahmudin telah melengkapi perizinan berusaha penangkapan ikan, pada kode proyek ini kapal terdaftar yaitu KM.Cahaya Nusa GT 26 dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, kapal beroperasi di WPP NRI 571 dan ZEEI WPP NRI 571, KM. Cahaya Nusa GT 26 melaporkan kedatangan, membayarkan kewajiban PNBPN serta melaporkan keberangkatan dan melaksanakan kewajiban selama periode penangkapan.
ELICON	202309-2711-3428-4046-545	OSS	Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali Jumlah kapal yang dimiliki: 2
H TEO JOHAN PAIDI ALIAS AYATULLAH TEOHAN	202303-2310-4505-7238-727	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 21 April 2024 Kapal Bintang Bahari telah memperpanjang izin sampai dengan 31 Des 2024 Kode Proyek 202404-1911-1700-7649-396

			Pangkalan Kapal Telah berpindah ke PPS. Bitung
ONO	202302-0911-3332-3402-551	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 8 April 2024 Kapal Sinar Mutiara telah memperpanjang izin sampai dengan 31 Des 2024 Kode Proyek 202310-1911-4353-7042-330
SITI ZAHARAH	202312-1405-4914-2897-303	OSS	Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan Kode proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 31 Desember 2024
WAHANA DEWI	202301-2415-0437-9126-603	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 14 Februari 2024 Kapal Batam Mas telah memperpanjang izin sampai dengan 31 Des 2024 Kode Proyek 202402-0509-4824-6205-842 Pangkalan Kapal Telah berpindah ke PPS. Bitung
PAIRAN	202310-3010-2527-5679-376	OSS	Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali
EK CIEN NOVIANTI	2024-1200-00-032-0044	OSS	Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali
TIONG TOK	202301-1609-3141-4168-117	OSS	Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali
SUTARTO SEBASTIAN	201912-1621-2145-2857-138	OSS	Kode Proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 31 Desember 2023 Kapal DELI LAUT telah memperpanjang izin sampai dengan 31 Desember 2024 dengan Kode Proyek 202312-1713-3336-1668-913. Kapal DELI LAUT telah berpindah pangkalan ke PPN. Sibolga

CALVIN CHANG	202310-1109-4827-1945-375	OSS	Nilai Kepatuhan teknis pelaku usaha baik sekali dan jumlah kapal yang dimiliki 2 unit kapal
MAHAL SANUSI	202302-0615-0920-4395-358	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan Kode proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk izin yang berlaku sampai 02 Maret 2024. Kapal Anugerah Bahari telah memperpanjang izin usaha yang berlaku sampai 31 Desember 2024 dengan kode proyek 202401-3013-4041-4353-478
FIRZA ALFARIDZI	202312-2215-5921-1798-446	OSS	Tidak Ditemukan Adanya Indikasi Pelanggaran
ZULFAKRI	202405-0811-4543-0703-204	OSS	Tidak Ditemukan Adanya Indikasi Pelanggaran
ZULFAKRI	202308-0918-1431-4474-909	OSS	Tidak Ditemukan Adanya Indikasi Pelanggaran
LADY FRISTANTI	202311-3011-3930-4699-763	OSS	

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2024 kepada 7 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Capaian pada TW III tahun 2024 ini lebih besar bila di bandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dengan capaian 5 pelaku usaha. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 28. Rekap Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Nama	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PT CITRADIMENSI ARTHALI	201912-3015-2557-6214-588	OSS	Tidak ada indikasi pelanggaran, nilai kepatuhan teknis "Baik Sekali"
PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	201912-2322-2137-1177-815	OSS	Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk KBLI 10299 - Industri Pengolahan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya milik PT. Medan Tropical Canning and Frozen Industries sudah tidak beroperasi lagi dan direkomendasikan untuk melakukan pencabutan kode KBLI tersebut pada sistem OSS

PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202406-2019-2853-0396-145	OSS	Seluruh persyaratan umum dan khusus usaha serta pemenuhan sarana dari unit usaha tersebut telah terpenuhi
Anisa	-	Tidak berijin	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha 60 % (baik)
Ridwan	-	Tidak berijin	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usah 65% (Baik)
PARIDA	-	Tidak berijin	Nilai Kepatuhan Teknis Bernilai Baik
MASYITOH	-	Tidak berijin	Nilai Kepatuhan Teknis bernilai Baik

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor unit pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor unit pengolahan ikan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 kepada 5 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian pada TW III tahun 2024 ini lebih sedikit bila di dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dengan capaian 6 pelaku usaha. Berikut tabel capaian Pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan Triwulan III Tahun 2024

Tabel 29. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

Nama	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	202211-2213-2513-8057-017	OSS	Tidak terdapat indikasi pelanggaran, semua kriteria yang dinilai terpenuhi sehingga nilai kepatuhan pelaku usaha baik sekali (100%)
PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202406-2019-3650-5245-161	OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. SSP KBLI 46206 memproduksi produk ikan beku yang dipasarkan ke Chin. 2. Pasokan bahan baku sebesar 17.600 Kg per bulan yang berasal dari Deli Serdang & Gabion 3. Total produksi sebesar 94.690 Kg (Januari - Juni 2024) 4. Nilai Kepatuhan teknis sebesar 100% (Baik Sekali)
JONO	202112-0916-1350-2898-406	OSS	Usaha ini telah memenuhi perizinan berusaha, dan kepatuhan teknis bernilai 77,5%.
ACU BUDI	202312-0710-5204-9346-876	OSS	Skor Kepatuhan Teknis Baik Sekali, Pelaku usaha Belum memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas kapal dan secara keseluruhan telah memenuhi standar perizinan berusaha
ACU BUDI	202312-1111-2359-5755-675	OSS	Skor Kepatuhan Teknis Baik Sekali, Pelaku Usaha Secara keseluruhan Telah memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (traceability) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2024 kepada 25 pelaku usaha. Capaian pada TW III tahun 2024 ini lebih besar bila di bandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dengan capaian 10 pelaku usaha. Berikut tabel capaian Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 30. Rekap pengawasan budidaya

Nama	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PT AQUA FARM NUSANTARA	202311-2308-5007-4376-839	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis untuk KBLI 03226 ialah sebesar 100% dengan predikat baik sekali. Asal benih berasal dari Amerika. Pakan yang digunakan yaitu Sinta dan Afga (pakan buatan PT. Aquafarm Nusantara sendiri) dan tidak menggunakan obat.
PT AQUA FARM NUSANTARA	202106-2413-4740-9507-292	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis untuk KBLI 03226 ialah sebesar 100% dengan predikat baik sekali. Asal benih berasal dari Amerika. Pakan yang digunakan yaitu Sinta dan Afga (pakan buatan

			PT. Aquafarm Nusantara sendiri) dan tidak menggunakan obat.
PT AQUA FARM NUSANTARA	202311-2309-4105-9823-092	OSS	Nilai Kepatuhan Teknis untuk KBLI 03226 ialah sebesar 100% dengan predikat baik sekali. Asal benih berasal dari Amerika. Pakan yang digunakan yaitu Sinta dan Afga (pakan buatan PT. Aquafarm Nusantara sendiri) dan tidak menggunakan obat.
PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7291-088	OSS	1. Dari hasil pengawasan di lapangan bersama dgn BKPM, Petugas tidak menemukan keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana pada Alamat sesuai profil pelaku usaha yang ada pada sistem OSS / perizinan berusaha dan Kontak Person Perusahaan tidak bisa dihubungi. 2. Dari hasil pengawasan lapangan, petugas pelaksana berkoordinasi dengan BPSPL Padang Satker Pekanbaru, mereka menyampaikan tidak mengetahui adanya Perusahaan ini. Petugas pelaksana juga sudah mencari informasi ke penyuluh perikanan dan masyarakat sekitar Alamat Lokasi usaha, tidak ada yang mengetahui keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana;
PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7292-596	OSS	1. Dari hasil pengawasan di lapangan bersama dgn BKPM, Petugas tidak menemukan keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana pada Alamat sesuai profil pelaku usaha yang ada pada sistem OSS / perizinan berusaha dan Kontak Person Perusahaan tidak bisa dihubungi. 2. Dari hasil pengawasan lapangan, petugas pelaksana berkoordinasi dengan BPSPL Padang Satker Pekanbaru, mereka menyampaikan tidak mengetahui adanya Perusahaan ini. Petugas pelaksana juga sudah mencari informasi ke penyuluh perikanan dan masyarakat sekitar Alamat Lokasi usaha, tidak ada yang mengetahui keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana;"
PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7295-886	OSS	1. Dari hasil pengawasan di lapangan bersama dgn BKPM, Petugas tidak menemukan keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana pada Alamat sesuai profil pelaku usaha yang

			ada pada sistem OSS / perizinan berusaha dan Kontak Person Perusahaan tidak bisa dihubungi. 2. Dari hasil pengawasan lapangan, petugas pelaksana berkoordinasi dengan BPSPL Padang Satker Pekanbaru, mereka menyampaikan tidak mengetahui adanya Perusahaan ini. Petugas pelaksana juga sudah mencari informasi ke penyuluh perikanan dan masyarakat sekitar Alamat Lokasi usaha, tidak ada yang mengetahui keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana;"
PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7293-303	OSS	1. Dari hasil pengawasan di lapangan bersama dengan BKPM, Petugas tidak menemukan keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana pada Alamat sesuai profil pelaku usaha yang ada pada sistem OSS / perizinan berusaha dan Kontak Person Perusahaan tidak bisa dihubungi. 2. Dari hasil pengawasan lapangan, petugas pelaksana berkoordinasi dengan BPSPL Padang Satker Pekanbaru, mereka menyampaikan tidak mengetahui adanya Perusahaan ini. Petugas pelaksana juga sudah mencari informasi ke penyuluh perikanan dan masyarakat sekitar Alamat Lokasi usaha, tidak ada yang mengetahui keberadaan PT. Istanaindo Family Arowana;"
Iestari Bandeng	202311-3017-3253-9237-303	KPB	Penilaian Teknis Pelaku Usaha KBLI 03251 sebesar 79,8 (baik Sekali), Produksi 5 Ton/tahun,
Kelompok Pokdakan Maju Sejahtera I	-	KPB	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha yaitu 55 %, Belum memiliki NIB
Kelompok Perikanan Anugerah Lele	-	KPB	Nilai kepatuhan usaha yaitu 60 % (Baik)
ADITYA	202408-1513-4257-4068-186	KPB	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Baik

Satrio Aji	202408-1506-5442-3824-625	KPB	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Baik
JOSEP GINTING	202302-2321-5209-8914-870	KPB	Berdasarkan nilai kepatuhan teknis, pelaku usaha KBLI 03224 dengan bobot penilaian 74% dengan penilaian kepatuhan usaha "Baik"
Syapuan Epis	202406-2716-2125-5782-977	KPB	1. Diperlukan adanya laporan kegiatan usaha untuk pemenuhan persyaratan khusus usaha 2. Diperlukan adanya pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur dan sebagai pemenuhan sistem manajemen usaha 3. Benih berasal dari unit pembenihan yang telah bersertifikasi CPIB 4. Pakan ikan yang digunakan oellet buatan PT. Central Proteina Prima Hi Provite 781 telah terdaftar di KKP
Huskal	202406-2715-1034-8127-290	KPB	1. Diperlukan adanya laporan kegiatan usaha untuk pemenuhan persyaratan khusus usaha 2. Diperlukan adanya pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur dan sebagai pemenuhan sistem manajemen usaha 3. Pakan ikan yang digunakan pelet buatan PT. Central Proteina Prima Hi Provite 781 telah terdaftar di KKP
M. Husen	-	Insidental	Hasil Pemeriksaan Usaha Budidaya Kakap Putih (M.HUsen) Baik Sekali (87%) Direkomendasikan mengurus perpanjangan sertifikat CBIB
PT.NEUHEUN AQUAKULTUR TIMUR	202308-3113-1927-7718-908	Insidental	CBIB DALAM PROSES PENGURUSAN DI PROVINSI
Robin Bakkara	-	Insidental	Nilai kepatuhan pelaku usaha ialah sebesar 77.5% (baik sekali). Belum menyampaikan LKU 6 bulanan ke Pemda terkait.
-	-	Insidental	Belum memiliki Nomor Induk Berusaha, dan dokumen pendukung teknis lainnya
Lena Sapriadi		LKR	Telah Memiliki NIB dan Perizinan dasar yaitu SPPL

A.Hamid		LKR	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha KBLI 03254 Sebesar 70 %
MUHAMMAD YATIM		LKR	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha 70 %, Kegiatan Budidaya Kepiting Soka.
Adham Mirza		LKR	
Sapriadi		LKR	Nilai perhitungan teknis 70,83% (Baik Sekali)
Adham Mirza		LKR	Hasil perhitungan kepatuhan teknis 70,83% (baik sekali)

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

5. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

a. IKU 9: Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneraan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. peneraan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. peneraan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan perikanan, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Peneraan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks peneraan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah peneraan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekpose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 80 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 29 dari 29 kasus peneraan administrasi

yang terdiri dari 15 Kasus SPKP dan 14 Kasus Pelanggaran Perizinan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 31. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III 2023	TW III 2023
Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	70	80	80	80	100

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	0	0	93	-	-
Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	-	-	-	80	-
Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-	-	-	-	80

Tabel 33. Rekap pengenalan sanksi administratif

No.	Nama Kapal (GT)	Jenis Kapal	Alat Tangkap	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan		
				Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
1	MITRA SEJATI - 58	PENANGKAP	Pancing Ulur	HU JU		Edi Saputra	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	SIPI habis masa berlaku, tanpa dilengkapi SLO dan SPB, melanggar DPI diatas 12 mil	SP1	B.810/PSDKPSta.2.2/PW.110/II/2024	21 Maret 2024
2	SELAMAT JADI XXXII	PENANGKAP	Pancing Cumi	WILSON ALLEN YOUNG		Riswanto	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1021/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
3	SELAMAT JADI XXXI	PENANGKAP	Pancing Cumi	YUKI AGUSTWO		Hamdani	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1019/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
4	MAHKOTA -38	PENANGKAP	Pancing Ulur	CALVIN		Mhd Iman	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.839/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024	25 Maret 2024
5	SUMBER LAUT	PENANGKAP	Purse Seine	SUHENDRA		Usman Ginting	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.842/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024	25 Maret 2024
6	BINTANG TERANG XVIII	PENANGKAP	Pancing Ulur	RITA SUSANTI		Agus Syahputra	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1020/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
7	CAMAR - 25	PENANGKAP	Bouke Ami	Sarwo Pranoto			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1127/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
8	PELITA - 1	PENANGKAP	Bouke Ami	Susanto			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1128/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
9	SUMBER BINTANG REZEKI 88	PENANGKAP	Purse Seine	ILYAS SANGKOT			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.0001/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	13 Mei 2024
10	PRIMA JAYA	PENANGKAP	Purse Seine	LISNAWATY			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. HIU 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1409/PSDKPSta.2/PI.120/V/2024	13/Mei/24
11	SUMBER MUTIARA INDAH	PENANGKAP	PSPK	PO TJAI			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1134/PSDKPSta.2/PW.110/V.2024	07 Mei 2024
12	HARTATI 3	PENANGKAP	Purse Seine	ARSAN JEFRI			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1133/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
13	MEKAR BARU 58	PENANGKAP	Purse Seine	HENDY			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	Kapal beroperasi diatas 12 mil laut tanpa dilengkapi SIPI, SPB dan SLO yang berlaku, dan melakukan bongkar muat di laut	SP1	B.1228/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	17 Mei 2024
14	TANJUNG - I	PENANGKAP	Gill Net	HERMAN			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	Kapal beroperasi diatas 12 mil laut tanpa dilengkapi SIPI, SPB dan SLO yang berlaku, dan melakukan bongkar muat di laut	SP1	B.1227/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	17 Mei 2024

Perhitungan Capaian Sanksi Administrasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU	
		TRANSSH IPMENT	PELAB UHAN PANGK ALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLA H	DALA M PROS ES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMAN GGILAN	BUKAN PELANGG ARAN	SP1	SP2	DEN DA		PIDA NA
						<30 hari	>30 hari	Total										
1	BELA WAN	-	-	-	15	-	-	-	15	-	15	2	1	10	2	-	-	100%
	TOTAL	-	-	-	15	-	-	-	15	-	15	2	1	10	2	-	-	100%

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama Triwulan III tahun 2024 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 262.422.845,- atau sekita 83,84% dari total pagu Rp.313,000,000,-.

6. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
2. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
6. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
8. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);

10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Selama kurun waktu Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 6 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 1,4,5,7,10 dan 13.

a. IK 12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

Formula:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 87,67 dari target 80. Apabila dibandingkan dengan TW III tahun 2023 terdapat penurunan capaian sebesar 0,75 karena capaian Pada TW III tahun 2023 IKU ke-12 ini sebesar 88,42. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 34. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III	2024	TW III 2024	s/d TW III	TW III 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	80	87,67	87,67	88,42

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	-	0	80	80	80	80

b. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang

dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sedikit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada Triwulan III tahun 2024**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian pada TW III Tahun 2024 ini sama dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 36. Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III	2024	TW III 2024	s/d TW III	TW III 2023
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

c. **IK 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Keikutsertaan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;
- Keaktifan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffice dengan target 94% pada Triwulan III Tahun 2024. Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 128,89%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III Tahun 2024 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada Triwulan III ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffice dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Capaian IK ini pada TW III Tahun 2024 ini mengalami peningkatan bila di dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 101,85%. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 37. Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2024	2024	TW III 2024	s/d TW III	TW III 2023
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94%	94%	128,89%	128,89%	101,85%

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;

- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Stasiun PSDKP Belawan dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada TW III tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 9 IKU dengan capaian ke 9 IKU tersebut tercapai 100%. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja TW III tahun 2024 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan , Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TW III							
			Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Indeks	100,00	89,95	89,92	100,00	92,56	99,51	88,29	96,83
2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	100,00	98,33	100,00	99,00	100,00	96,77	88,81	100,00
3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP	Indeks	98,81	92,95	92,59	94,16	93,80	88,42	94,57	87,67
9	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak	%	132,22	122,78	133,33	133,33	129,44	133,33	130,56	128,89

D. Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada Stakeholder, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan III Tahun 2024. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III 2024 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Belawan.

2. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

E. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2024 tanggal 24 November 2023, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 36.669.969.000,-. Pada TW III, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan penambahan anggaran untuk pembangunan renovasi Stasiun PSDKP Belawan, sehingga anggaran Stasiun PSDKP Belawan bertambah menjadi Rp. 38.259.850.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar Rp. 26.806.009.890 atau 70,06% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan III Tahun 2024, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun Triwulan III tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 105,76. Selama kurun waktu Triwulan III UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 9 Indikator Kinerja. 2 IK biru (istimewa) 7 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan IIII Tahun 2024. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2024 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 39. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Memperhatikan Kinerja atau Target yang telah di berikan Pada Tahun 2024 agar semua nya tercapai pada TW IV tahun 2024	<ul style="list-style-type: none">Melakukan Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none">Triwulan IV